JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

DI DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN GORONTALO

[1] Muh Firyal Akbar, [2] Widya Kurniati Mohi, [3] Srihandayani Suprapto, [4] Marwah Abdullah
1)Keperawatan Program Studi Administrasi Publik Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo 2024, Indonesia
e-mail : marwahabdullah512@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published:

Kata Kunci :
3-5 Kata Kunci Dipisahkan dengan Tanda Koma

Keywords:
Please Provide 3-5 Words of Keywords Separated by Comas

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

An overview of regional asset management in raising original regional income (ORI) in the Gorontalo Regency Youth, Sports, and Tourism Service is the goal of this study. The research methodology employs a qualitative approach and a qualitative research type. Several informant interviews, observation, and the recording of secondary data pertaining to the research problem were used as data collection methods. According to the study's findings, the Gorontalo Regency Youth, Sports, and Tourism Service's regional asset management was subpar for boosting local revenue. due to a lack of funding and a lack of facilities. In addition to poorly managed asset inventory or recording, some assets—such as two-wheeled vehicles—have not yet been written off, which raises maintenance costs, and the assessment of asset use has not been at its best. Therefore, in order to manage regional assets, regional governments need to expand the capacity of their apparatus and conduct frequent inventory and appraisals.

Keywords: *Regional Original Income, Asset Management*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang Pengelolaan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan dan observasi serta pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo belum optimal. Karena keterbatasan fasilitas dan anggaran yang kurang memadai. Pencatatan ataupun iventarisasi aset belum teroganisir dengan baik, masih ada aset yang belum dihapuskan yakni kenderaan roda dua sehingga menambah biaya pemeliharaan, serta evaluasi pemanfaatan aset yang belum optimal. maka dari itu pemerintah daerah harus melakukan inventarisasi dan evaluasi secara berkala serta meningaktkan kemampuan kapasitas aparatur dalam mengelola aset daerah.

Kata kunci : Pengeloaan Aset, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem desentralisasi dimana pelimpahan wewenang atau penyerahan wewenang oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sehingga konsekuensi logis dari otonomi daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki suatu kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada secara berdayaguna dan berhasil guna serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang ada.

Aset dapat diartikan sebagai semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial atau nilai pertukaran yang dimiliki atau digunakan suatu badan usaha, lembaga atau perorangan. Aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dan barang bergerak (inventarisasi) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, yang dimiliki dan dikuasai oleh instansi lembaga pemerintah dan non departemen, badan-badan tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan pemerintah daerah.(Siregar, 2004).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapt menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat dihandalkan dalam penyelenggaran otonomi otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah harus dapat menggali potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Berpedoman pada Undang-Undang otonomi daerah, daerah kebupaten/kota diharapkan mampu memanfaatkan seoptimal mungkin potensipotensi yang ada dikawasan kabupaten/kota itu sendiri. Hal ini, dimaksudkan dalam rangka membiayai segala aktifitas pembangunan dan kelancaran roda perekonomian termasuk mendorong kinerja pemerintah dalam pengembangan daerahnya. (Halim, 2007).

Dengan adanya pengelolaan aset yang tepat maka dapat membantu suatu instansi untuk mengidentifikasi daftar kekayaannya. Hal ini tidak hanya untuk melihat aset mana saja yang telah dibeli, berapa biayanya, serta aset mana saja yang digunakan dan bagaimana manfaatnya, namun untuk mencegah hilangnya aset atau pencurian aset dan yang paling penting yaitu untuk memudahkan proses pertanggung jawabannya, terutama instansi terkait yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam konteks ekonomi islam, pengelolaan aset memiliki dimensi etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang sangat kuat.

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengeleolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD. Dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan asset yang memadai juga, dimana menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni :(1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara sefisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring).

METODE

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang

permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai paradigma. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. (Sugiyono, 2011)

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, peneliti menggunakan penelitian deskriptif. Sebab pada penelitian ini lebih dipusatkan pada deskripsi data menjadi kalimat-kalimat yang luas berasal dari informan. Kemudian peneliti menggunakan metode kualitatif sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Aset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Tata Laksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah Kabupaten di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan serta kepariwisataan yang diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal didalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan Landasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Tugas pokok Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo adalah melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Keolahragaan dan Kepemudaan serta kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepariwisataan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga dan Pariwisata.
3. Pembina dan unsur pelaksana tugas bidang kepemudaan, keolahragaan dan Kepariwisataan.
4. Selain sumber daya manusia yang sudah disebutkan dalam struktur diatas, yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

Table 1. Aset/Modal penunjang kegiatan operasional Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Gorontalo

5. No	Jenis Aset	Lokaasi	Jumlah	Ket
1	Sport Center	Limboto	1 Unit	
2	Gor 23 Januari	Telaga	1 Unit	
3	Objek Pentadio Resort	Pentadio	1 Unit	
4	Menara Tower Pakaya	Limboto	1 Unit	
5	Bandayo Poboide	Limboto	1 Unit	
6	Taluhu Barakati	Batudaa	1 Unit	

Sumber : Profil Dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata kab.Gorontalo

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diurai pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan aset daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo belum optimal. Adapun indikator tersebut sebagai berikut :

1. Indikator Perencanaan menunjukkan bahwa pengeloaan aset di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo belum optimal karena keterbatasan fasilitas dan anggaran yang kurang memadai.
2. Indikator pelaksanaan menunjukkan bahwa belum optimal ditunjukan dengan pencatatan ataupun iventarisasi aset belum teroganisir dengan baik, masih ada aset yang belum dihapuskan yakni kenderaan roda dua sehingga menambah biaya pemeliharaan.

Indikator pengawasan sudah dilakukan secara internal dan eksternal namun belum maksimal ditunjukkan dengan evaluasi kurangnya fasilitas gedung untuk melakukan pertemuan.

REFERENSI

Afifuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: CV Alfabeta.

Baldric Siregar. 2017. Akuntansi Sektor Publik.Edisi 2. Yogyakarta : UPP

Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Haryono, A. 2007. Modul Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara. Tangerang: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia(Edisi revisi cetakan ke tiga belas). Jakarta : PT Bumi Aksara

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2012. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP

Moleong, Lexy J. *2012.* Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya.

Pasalog, Herbani. 2012. Teori Administrasi Publik. Alfabeta : Bandung

Siregar, Doli D. 2002. Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta

Sutrisno Hadi. 2004. An Investigation of Participation Project Appraisal in Developing Countries Using Elements of Value an Risk Management, Yogyakarta

Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2001. Metode Penelitian Sosial- Bandung: Remaja Rosdakarya

Terry, George R. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)